



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SULAWESI TENGGARA

“TRANSFORMASI KANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA DALAM PENGUATAN TATA KELOLA PELAYANAN DAN PENGAWASAN”

**BULETIN EDISI XVII
04 - 08 APRIL 2026**





PENGUATAN TATA KELOLA, KANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA LANTIK PEJABAT NONMANAJERIAL

Kendari, 04 Mei 2026 – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Ganda Samosir, melaksanakan upacara pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat nonmanajerial di lingkungan Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara.

Pelantikan yang berlangsung khidmat ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia terkait pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain.



Sebanyak dua orang pejabat dilantik dalam kegiatan ini, masing-masing berasal dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara dan Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi.

Dalam arahnya, Kepala Kantor Wilayah menekankan pentingnya integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas, khususnya dalam mendukung tertib administrasi dan pengelolaan arsip yang akuntabel.

Pelantikan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan kualitas kinerja aparatur, sejalan dengan nilai-nilai PRIMA Kemenimipnas.

KANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA GELAR RAPAT TIMPORA SE-PROVINSI, PERKUAT SINERGITAS CEGAH TPPO DAN TPPM



Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Provinsi Sulawesi Tenggara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) tingkat provinsi di Wonua Monapa Hotel and Resort, Kabupaten Konawe Selatan. Mengusung tema “Pencegahan TPPM/TPPO Melalui Sinergitas Timpora,” rapat ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menangani kejahatan transnasional. Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra, Ganda Samosir, hadir sebagai narasumber utama.

Rapat membahas isu strategis meliputi pencegahan illegal entry melalui jalur rawan, penguatan deteksi fraud travel document, koordinasi penanganan TPPO/TPPM khususnya bagi calon PMI non-prosedural, serta penertiban penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA.

“kami berharap forum koordinasi ini menjadi landasan yang kokoh bagi seluruh instansi untuk terus bersinergi dan berkolaborasi secara lintas sektoral. Pengawasan keimigrasian yang efektif bukan semata tanggung jawab imigrasi ini adalah tanggung jawab kita bersama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara di wilayah Sulawesi Tenggara,” ujar Ganda Samosir, Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini sejalan dengan salah satu dari 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026, yakni penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) sebagai langkah preventif TPPO dan TPPM. Kehadiran pimpinan lintas sektor menegaskan komitmen bersama dalam memperkuat pengawasan orang asing dan menjaga stabilitas keamanan wilayah.

OPTIMALKAN KUALITAS PELAYANAN, KANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA HADIRI BIMTEK PEKPPP MANDIRI 2026 DI JAKARTA



JAKARTA – Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima dan terukur, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Keimigrasian Sulawesi Tenggara turut serta dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 4 hingga 6 Mei 2026, bertempat di Hotel Grove Suites by GRAND ASTON, Jakarta.



Fokus Utama : Standarisasi Evaluasi Mandiri

Bimtek ini bertujuan untuk membekali satuan kerja dengan pemahaman mendalam mengenai mekanisme dan instrumen evaluasi terbaru. PEKPPP Mandiri merupakan instrumen krusial untuk:

- Mengukur efektivitas : layanan keimigrasian di daerah.
- Menjamin akuntabilitas : kinerja penyelenggara pelayanan publik.
- Mengidentifikasi area perbaikan : secara mandiri sebelum dilakukan evaluasi nasional.

Komitmen Sulawesi Tenggara

Kehadiran perwakilan dari Kanwil Ditjenim Sulawesi Tenggara menegaskan komitmen wilayah dalam mendukung transformasi digital dan integritas pelayanan yang dicanangkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Dengan mengikuti bimbingan teknis ini, diharapkan jajaran Keimigrasian di Sulawesi Tenggara dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat untuk meraih predikat kinerja pelayanan publik yang "Sangat Baik" atau "Prima" pada evaluasi tahun berjalan.



PERKUAT SINERGITAS DAN KEDAULATAN, KAKANWIL IMIGRASI SULTRA LEPAS TIM OPERASI GABUNGAN KE KONAWE SELATAN



Pagi ini, Kamis (18/9), Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara memimpin langsung pelaksanaan Apel Pelepasan Operasi Gabungan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Provinsi. Kegiatan yang berlokasi di wilayah Kabupaten Konawe Selatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi serta pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing agar tetap sejalan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.



Tim gabungan yang diterjunkan merupakan kolaborasi solid yang terdiri dari unsur Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra, Polda Sultra, BIN Daerah, Kesbangpol Prov. Sultra, dan Disnakertrans Prov. Sultra. Kehadiran berbagai instansi ini menunjukkan komitmen kolektif dalam menjaga stabilitas wilayah serta memastikan bahwa setiap keberadaan orang asing memberikan manfaat positif tanpa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Bumi Anoa.

Dalam arahnya, Kakanwil menegaskan kepada seluruh personel agar melaksanakan tugas dengan mengedepankan pendekatan yang humanis namun tetap menjunjung tinggi profesionalisme. Beliau mengingatkan bahwa setiap tindakan di lapangan harus didasari pada Standar Operasional Prosedur yang ketat serta rasa tanggung jawab yang besar sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara. Melalui operasi ini, diharapkan penegakan hukum keimigrasian di Kabupaten Konawe Selatan dapat berjalan secara efektif, transparan, dan berintegritas.



RAPAT TIMPORA BOMBANA: SINERGI PENGAWASAN ORANG ASING DAN PENCEGAHAN TPPO/TPPM



Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara hadir sebagai narasumber utama dalam Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA), sebuah forum koordinasi lintas instansi yang bertugas memantau keberadaan dan kegiatan warga negara asing di wilayah Indonesia.

Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu, 7 Mei 2026, bertempat di Ruang Rapat "Measa Laro", Kantor Bupati Bombana, ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd., M.Si., yang menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap penguatan TIMPORA. Seiring perkembangan sektor industri yang pesat di Bombana, pengawasan terhadap lalu lintas orang asing dinilai semakin mendesak untuk ditingkatkan.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Muhammad Novrian Jaya, selaku penyelenggara kegiatan, menegaskan bahwa Kabupaten Bombana merupakan bagian dari wilayah kerja Kanim Kendari, sehingga penguatan TIMPORA di wilayah ini merupakan salah satu bentuk konkret peningkatan keamanan keimigrasian di daerah.

Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara, Ganda Samosir, dalam paparannya menekankan bahwa pengawasan orang asing bukan semata-mata tanggung jawab institusi imigrasi, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat. Beliau memaparkan bahwa kehadiran warga negara asing di suatu wilayah harus diimbangi dengan sistem pengawasan yang terstruktur dan melibatkan seluruh instansi terkait. Dalam kesempatan ini, beliau juga menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) yang kerap memanfaatkan celah pengawasan di daerah berkembang. Dengan terbentuknya TIMPORA yang solid, potensi pelanggaran keimigrasian termasuk TPPO dan TPPM dapat ditekan sejak dini. Beliau berharap sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang terjalin melalui forum ini dapat terus diperkuat demi terwujudnya keamanan wilayah yang berkelanjutan.



COFFEE MORNING PIMPASA PERKUAT PENCEGAHAN TPPO DAN TPPM DI DESA BINAAN IMIGRASI



Wakatobi. 09 Mei 2026 — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Ganda Samosir, bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi melaksanakan kegiatan coffee morning bersama masyarakat di sejumlah Desa Binaan Imigrasi melalui program Pimpasa di Kabupaten Wakatobi.

Kegiatan ini akan yang berlangsung hingga Minggu (10 Mei 2026) ini menjadi sarana mempererat silaturahmi, mendengar langsung aspirasi masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara Imigrasi dan pemerintah desa dalam mendukung pembangunan wilayah serta peningkatan kesadaran hukum keimigrasian.

Dalam kegiatan tersebut, Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Edukasi kepada masyarakat desa terus diperkuat agar masyarakat lebih waspada terhadap modus pemberangkatan nonprosedural dan berbagai bentuk eksploitasi yang dapat merugikan masyarakat.

Melalui suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan, Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra bersama Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi terus berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, humanis, dan berdampak nyata bagi masyarakat melalui program Desa Binaan Imigrasi.

